



Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Rezki Satris

Universitas AMIKOM Yogyakarta

Email; rezki@amikom.ac.id

Abstract

The aims of this research to discribethedynamics of Indonesian foreign policy in response to overseas strategy United States for Palestine. Indonesia is a country that consistent in maintaining Palestinian sovereigntyto respond policy of president the United States Donald Trump of shifting municipalityIsrael at Jerusalem.Certainly this impact response to Islamic countries especially Indonesia.In addition, this study adopts qualitative approaches to look at collect various sources scientific, both from the journal, newspaper, books and website. Indonesia through foreign policy it conducted some approaches to countries in the world to respond Trump of the policy.

Keyword: Foreign Policy, Indonesia, Palestine, Jerussalem as capital

Pendahuluan

Dalam konteks hubungan internasional, politik luar negeri sebuah negara selalu dipengaruhi oleh kebijakan politik dalam negerinya. Artinya, segala kebijakan politik luar negeri yang terbangun tidak akan terlepas dari aspek kebijakan dalam negeri. Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi konsep kebijakan politik luar negerinya berdasarkan kepentingan politik dalam negeri.Dalam konstitusi undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik yang bebas aktif.Bebas berarti bahwa tidak terikat oleh sebuah ideologi atau politik negara asing maupun blok-blok negara tertentu. Sedangkan Aktif berarti bahwa berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta mengembangkan prinsip kebebasan, persamaan, kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara-negara lain.

Prinsip bebas aktif inilah yang menjadi ruh atau semangat perjuangan Indonesia untuk mengembangkan perannya di konteks internasional.Salah satu negara yang menjadi fokus Indonesia dalam memperjuangkannya hak kemerdekaannya adalah Palestina.Indonesia telah lama menjalin hubungan diplomasi dengan Palestina.Sejarah mencatat bahwa salah satu negara di Timur Tengah yang mendukung dan memberikan pengakuannya kepada Indonesia pasca proklamasi adalah Palestina (Noviar, 2015).

Komitmen Indonesia dalam menentang kolonialisme dan imperialisme telah ditegaskan oleh para pemimpin bangsa sejak diraihnya kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pengalaman masa penjajahan kurang lebih 350 tahun telah mengajarkan kepada bangsa Indonesia akan pahitnya hidup di bawah kolonisasi bangsa lain. Melalui pengalaman ini, Indonesia menyadari bahwa pentingnya sebuah negara yang lepas dari penjajahan adalah sebuah hak yang harus didapatkan oleh negara itu sendiri. Selain itu, Indonesia dengan prinsip bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan menentang setiap penjajahan, salah satunya adalah apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

Pendudukan Israel terhadap Palestina merupakan salah satu bagian dari penjajahan yang tidak berperikemanusiaan. Konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina menjadi konflik yang berkepanjangan. Di mana konflik ini melibatkan banyak hal termasuk melibatkan negara-negara di luar Israel dan Palestina. Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang memperebutkan wilayah salah satunya adalah wilayah Jerusalem.

Jerusalem merupakan kota suci tiga agama samawi yakni Yahudi, Kristen dan Islam. Selain sebagai kota suci, Jerusalem juga merupakan kota dengan sumber peradaban yang tinggi. Perpaduan tiga agama samawi menjadikan Jerusalem sebagai salah satu daerah di Timur Tengah yang diperebutkan antara Israel dan negara Arab (Palestina) yang pada akhirnya berujung konflik. Kronologi konflik pertama kali antara Israel dan Palestina dalam sejarah dimulai pada 1917-1947 di mana pada masa pemerintahan Inggris di Palestina dengan Jerusalem sebagai pusat pemerintahannya. Hingga melahirkan Deklarasi Balfour:

“His majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the right and political status enjoyed by Jews in any other country”. (The Balfour Declaration, 1917)

Melalui deklarasi inilah yang pada akhirnya Inggris menyerahkan mandat Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemudian, PBB mengusulkan pembagian dua negara yakni Yahudi dan Arab (Palestina). Hingga pada tahun 1948, sebuah deklarasi berdirinya Israel sebagai sebuah entitas negara. Hal inilah yang menandai terjadinya perang untuk pertama kalinya antara Israel dengan Palestina dan berakhir tahun 1949 dalam waktu sementara (“RI jalin langkah tekan Trump,” 2017).

Seiring dengan perkembangan zaman, konflik Israel Palestina semakin massif. Hal ini ditandai terjadinya perang lima hari antara Israel dan Arab. Hingga PBB mengeluarkan dua resolusi yang menyerukan kepada Israel agar menghentikan segala aksi yang akan mengubah status Jerusalem (“RI jalin langkah tekan Trump,” 2017). Peranan PBB dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah menjadi salah satu pengharapan dalam membangun konsep perdamaian di Timur Tengah yang berujung dengan perjanjian Oslo. Hingga pada 7 Desember 2017, sebuah pengakuan sepihak dari Amerika Serikat (AS) yang disampaikan oleh Presiden AS, Donald Trump yakni mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan kantor kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Sebuah pengakuan yang memberikan implikasi yang besar terhadap perdamaian dunia di Timur Tengah.

Hadirnya Amerika dalam kontekstasi pergulatan di Timur Tengah, memberikan pola dan struktur politik yang berbeda. Amerika Serikat yang dulunya menyatakan diri sebagai negara dengan pembawa pesan damai dan juga dikenal sebagai negara pembawa demokrasi di mana unsur keadilan dan perdamaian menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan, kini berubah

menjadi negara dengan membawa unsur gejolak konflik di Timur Tengah di masa pemerintahan Donald Trump. Tentu, dalam konteks politik luar negeri sebuah negara akan selalu berbeda di setiap rezim yang lahir. Jack C. Plano dan Roy Alton menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang paling menentukan proses pembuatan keputusan yaitu *Self-Preservation, Security, National Well-being, Protection and advancement of technology, and The pursuit of Power* (Plano & Olton Roy, 1978). Amerika Serikat merupakan negara yang menerapkan konsep dari kelima ini untuk menjalankan politik luar negerinya.

Dilihat dari sejarahnya, Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga barang siapa yang menguasainya akan mempunyai kedudukan strategis di dunia, keunikannya geopolitik dan geostrateginya diakui oleh negara-negara besar. (Ismah Tita Ruslin, 2013). Hal ini mengemuka pasca Perang Dunia II, situasi global saat itu ditandai oleh dominasi politik dan ekonomi negara-negara industri besar serta perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan kawasan Timur Tengah muncul sebagai kekuatan baru sekaligus “obyek” penting yang mulai diperhitungkan dalam konstelasi politik dunia.

Gejolak politik di Timur Tengah terutama konflik antara Palestina-Israel memberikan peluang bagi Indonesia tampil sebagai negara yang selalu mengusung konsep perdamaian dunia. Pasca pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadikan Indonesia sebagai mediator dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah terutama antara Palestina-Israel. Hadirnya Indonesia sebagai negara di luar kawasan Timur Tengah dalam membangun konsep damai, memberikan warna tersendiri bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana langkah yang dilakukan Indonesia melalui kebijakan politik luar negerinya dalam menciptakan perdamaian dunia pasca pengakuan sepihak oleh Amerika terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel?

Diplomasi Indonesia Terhadap Palestina

Pelaksanaan politik luar negeri RI telah mencerminkan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa guna mencapai kepentingan nasional Indonesia sekaligus terus berperan aktif dalam upaya perwujudan perdamaian dan keamanan dunia, baik ditingkat bilateral, regional dan global. Di tingkat global, Indonesia juga terus mengambil prakarsa dan inisiatif di berbagai isu multilateral, antarlain: perlucutan senjata dan *non-proliferasi*, penanggulangan terorisme, penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, *Millennium Development Goals* (MDGs), ketahanan pangan dan energi, pandemi, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya hayati, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional, HAM, reformasi PBB, Gerakan *Non-Blok* (GNB), Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Palestina, dan Kerja sama Selatan-Selatan. Khusus mengenai bidang perlucutan senjata, telah tercapai perkembangan yang cukup signifikan yaitu dirampungkannya perundingan antara mitra negara-negara ASEAN dan negara-negara pemilik senjata nuklir tentang Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara serta dirampungkannya proses ratifikasi *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT) (Ringkasan Ekskulsif, 2011).

Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik. Hal ini bisa dilihat dari faktor-faktor domestik dalam setiap politik luar negeri Indonesia mulai dari 1945-2007.

Tabel: Perbandingan Faktor-faktor domestik dalam politik luar negeri Indonesia (1945-2007) (Ganewati, 2016)

No.	Indikator	ERA ORDE LAMA			ERA ORDE BARU		ERA PASCA – ORDE BARU				
		Periode Awal Kemerdekaan-Pengakuan Kedaulatan	Demokrasi Parleментар	Demokrasi Terpimpin	1966-1982	1983-1997	BJ Habibie	Abdurrahman Wahid	Megawati	Susilo Bambang Yudhoyono	
1	Kondisi domestic: Ekonomi Keamanan Politik	- Nation state formation building - Ekonomi buruk			Konsolidasi ekonomi, politik dan keamanan	Stabilitas politik dan keberhasilan sosial ekonomi	- Instabilitas politik dan keamanan - Krisis ekonomi - demokratisasi			Relatif stabil makro ekonomi dan politik dan keamanan	
		Jatuh bangun parlemen		Stabilitas politik relative tercipta			- mengutamakan pembangunan sektoral - stabilitas politik dan keamanan - otoriter, nepotisme, dan pemasangan	Konflik vertical dan horisontal			Terorisme
		Pemberontakan PKI	- Politik aliran dan perdebatan konstitusi - Pemberontakan daerah					- Pemberontakan PKI - stabilitas politik			
2	Modalis	Nasionalisme Kuat			- Anti komunisme - Keberhasilan pembangunan ekonomi - Stabilitas politik	Image positif dari realitas demokratisasi: - Pembangunan di berbagai institusi domestic untuk demokrasi - Kebebasan pers - Penghormatan HAM - Pemilu legislative dan eksekutif secara transparan					
3	Struktur dan proses penentuan kebijakan	Parliament heavy			Soeharto	Secara umum keseimbangan Eksekutif dan legislative, tetapi dalam beberapa kasus tertentu eksekutif lebih berperan					
			Soekarno		ABRI Tekokrat	Golkar (ABRI) . Tekokrat) Islam					
4	Aktor : - Perumus - Pelaksana	Soekarno Syahrir Hatta	Parlemen dan Soekarno	Soekarno	Soeharto		State actor (Legislatif dan eksekutif), terutama sejak masa A. Wahid, non-state actor mulai berperan				
					Tekokrat ABRI	Golkar					

5	Agenda utama Polugri	Pengakuan kedualatan		Pengakuan alternatif pemimpin dunia	Menarik investasi Barat dan berperan aktif secara regional dan internasional	Pemulihan ekonomi dan mengawal demokrasi		
						Menjaga keutuhan integritas nasional		
6	Isu domestik yang dominan	- Agresi Belanda - Diplomasi kedaulatan wilayah	-Diplomasi internasional untuk Irian Barat - Pemberontakan daerah - Jatuh bangun parlemen - Politik aliran	-Politik keseimbangan militer dan komunis _ Nekolim _ Netos vs Defos	Stabilitas dan pembangunan ekonomi serta anti komunisme	- Krisis ekonomi - Demokratisasi		
						Penyederhanaan partai, monolyalis birokrasi	Asas tunggal	Separatisme dan konflik horizontal
		Teroris me						
7	Gaya	Aktif		Low profile akomodatif	High Profile	No Profile		
		High profile				Acak		
	Pola	Mendayung di antara dua karang	Friksi kekuatan kiri dan kanan	“Kekiri-kirian”	“Kekanan-kanan”	Menabrak semua karang		Mengarungi semua samudra

Dilihat dari tabel di atas, perjalanan politik luar negeri Indonesia telah mengukuhkan eksistensi Indonesia di kancah global, sekaligus sebagai upaya dalam meraih kepentingan nasional. Dari tabel ini politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa mulai dari orde lama hingga pasca reformasi memiliki dinamika yang beragam khususnya dalam aspek domestik. Dari perubahan domestik inilah memberikan pengaruh terhadap kebijakan politik luar negeri (Ganewati, 2016).

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sejarah kedua negara sudah dimulai sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia. Diplomasi pengakuan kemerdekaan Indonesia pertama kali dimulai dari Mesir dan Palestina. Tim delegasi Indonesia yang dikirim ke negara-negara Timur Tengah mendapat sambutan dan dukungan dari Syaikh Muhammad Amin Al-Husaini seorang mufti Palestina yang kemudian membantu Indonesia dalam melobi negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Hingga kemudian Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali pada 1947 dan kemudian diikuti oleh negara-negara Arab lainnya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia selalu aktif menentang penjajahan Israel atas Palestina. Meskipun Israel telah mengakui kemerdekaan Indonesia pada Januari 1950, namun Indonesia belum mengakui kemerdekaan Israel (Aslamiah, 2015).

Tahun 1974 Indonesia mengakui keberadaan PLO (*Palestine Liberation Organization*) yang didirikan oleh Yasser Arafat sebagai representatif dari masyarakat Palestina di kancah internasional. Tahun 1988 Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 15 November di Aljiria, ibu kota Aljazair. Sehari kemudian pada 16 November Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina dan juga menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina. Sedangkan

Indonesia menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama negara Palestina masih dijajah. Tahun 1991 kantor Kedutaan Besar Palestina secara resmi dibuka di Jakarta. Tahun 1993 Presiden palestina, Yasser Arafat melakukan kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan presiden Soeharto (Aslamiah, 2015).

Pada tahun 2006 setelah kemenangan Hamas dalam pemilu, Indonesia menyatakan menghormati keputusan rakyat Palestina yang telah menyelenggarakan pemilu dengan demokratis, dan menghimbau negara-negara barat yang menentang hasil pemilu tersebut untuk tidak berprangangka terhadap Hamas. Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2010. Kunjungan Palestina ini bertujuan untuk meminta dukungan Indonesia, baik dalam upaya menghidupkan kembali proses perdamaian, maupun rekonsiliasi internal Palestina, khususnya antara faksi Fatah dan Hamas. Kedua belah pihak berkomitmen akan berupaya mencari jalan bagi kemerdekaan Palestina (Aslamiah, 2015).

Faktor dan Dukungan Indonesia Terhadap Palestina serta Langkah Indonesia dalam Merespon Isu Pemindahan Ibu Kota Israel

Hadirnya dukungan Indonesia terhadap Palestina menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang fokus terhadap isu-isu kemanusiaan. Segala bentuk penindasan dan ketidakadilan menjadi koncern utama terhadap keberpihakan Indonesia dari negara-negara tertindas. Melalui pemerintahan Presiden Joko Widodo setidaknya ada empat kebijakan yang menjadi koncern utama dalam masa pemerintahannya. Pertama, *inward-looking* adalah prinsip politik luar negeri yang dianut selama ini, yakni prinsip bebas-aktif. Prinsip ini membukaruang bebas bagi interpretasi dan pemaknaan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Ini dapat dilihat dalam rumusan visi dan misi hubungan luar negeri Jokowi-JK, yakni “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong”. Visi ini mempertegas makna “kebebasan” Indonesia dengan cara mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian nasional. Di dalamnya juga termaktub sikap dan sifat “aktif” untuk dapat merealisasikan kemandiriannasional atas landasan kerjasama positif dan konstruktif yakni gotong-royong.

Terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi dukungan Indonesia untuk Palestina, diantaranya: 1. Anti kolonialisme. Sesuai dengan amanat konstitusi yakni pembukaan UUD 1945 Indonesia merupakan negara yang menolak adanya penguasaan negara terhadap negara lain. Palestina sebagai sebuah negara yang telah memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1988 telah mendapat pengakuan dari Indonesia. Palestina sebagai negara berhak untuk memiliki pemerintahan yang berdaulat bebas dari campur tangan bangsa lain. Namun pada faktanya Israel yang menjajah tanah Palestina sehingga membuat Palestina belum dapat menikmati kedaulatannya secara penuh. 2. Islam. Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan 82.5% nya merupakan muslim yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat dilihat dari dorongan terhadap Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang melahirkan KTT luarbiasa OKI tahun 2016 yang memastikan 23 poin dalam deklarasi Jakarta bisa terimplementasikan. Selain itu, Indonesia juga mendorong para pemimpin OKI untuk memobilisasi terhadap dukungan Palestina dalam forum internasional serta Indonesia mendorong adanya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah dalam forum OKI (Sukamta, 2017).

Palestina sebagai bagian dari tanah Arab yang merupakan daerah dimana agama Islam berasal, memiliki keterikatan yang kuat dengan Islam itu sendiri. Sehingga masyarakat Indonesia memiliki simpati yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.³ Kemanusiaan. Konflik antara Israel dan Palestina sering menyebabkan bencana kemanusiaan di wilayah ini akibat korban perang dan penjajahan Israel., perang sering kali terjadi dan jatuhnya korban jiwa tak dapat dihindarkan. Sejarah mencatat sejak Inggris menyatakan komitmennya untuk mendukung pendirian negara Israel di tanah Palestina bangsa Yahudi melakukan berbagai pengusiran, penyiksaan dan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Bahkan ada yang menyebut apa yang dilakukan Israel adalah tindakan genosida atau pembersihan etnis, karena Israel tidak pandang bulu dalam setiap serangannya yang banyak menewaskan warga sipil, baik itu wanita maupun anak-anak.⁴ Perdamaian Dunia. Hari ini, banyak sarjana dan politisi menganggap bahwa solusi dari masalah Palestina adalah satu-satunya kunci untuk perdamaian dan stabilitas internasional. Mendukung kemerdekaan Palestina dan menyelesaikan konflik ini merupakan langkah dalam mewujudkan perdamaian dunia.⁵ Stabilitas Politik dalam Negeri. Konflik Palestina merupakan konflik yang menarik perhatian masyarakat internasional terutama muslim, termasuk di Indonesia.

Isu ini dapat dikategori ke dalam arena konstituen, yang artinya pemerintah melihat bahwa isu ini dapat menjadi jalan untuk mendapat simpati publik. Sehingga opini publik terkait isu ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan luar negeri.⁶ Agenda Utama Politik Luar Negeri. Menurut M. Muttaqien konflik Arab-Israel merupakan isu penting bagi politik luar negeri Indonesia. Konflik ini merupakan konflik yang menarik perhatian publik internasional. Indonesia merupakan anggota aktif dari berbagai organisasi internasional seperti OKI, GNB, New Asian African Strategic Partnership (NAASP) yang mana organisasi-organisasi tersebut memiliki perhatian khusus terhadap konflik Israel-Palestina. Sehingga penting bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya dalam upaya mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Pada tahun 2007-2008, dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, selalu memberikan dorongan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan kebijakan atau pun keputusan terkait isu-isu Palestina (Aslamiah, 2015). Selain itu, dalam konteks peningkatan kapasitas *building* Indonesia menginisiasi *New Asian African Strategic Partnership for Palestinian Development* (*The New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP), 2012).

Pasca diumumkannya Jerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump 7 Desember 2017, Indonesia segera mengambil langkah untuk mengantisipasi munculnya konflik-konflik baru. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia melalui Menteri luar Negerinya adalah dengan melakukan koordinasi di beberapa negara-negara di Timur Tengah untuk segera mengadakan konferensi tingkat tinggi luar biasa Internasional melalui OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Dalam konferensi yang diadakan di Turki pada 13 Desember 2017 menghasilkan Deklarasi Istanbul “Kebebasan untuk Al-Quds”. Deklarasi historis ini secara kategoris menolak usaha Amerika Serikat dan Israel untuk mengubah status hukum Al-Quds (Jerusalem) serta mengajak komunitas internasional untuk menuruti dan menaati hukum internasional. Selain itu, juga menyerukan dunia untuk mengakui Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina yang sekarang diduduki Israel (Trias, 2017).

Hadirnya empat kekuatan utama di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, Turki dan Mesir, dapat dikatakan bahwa hubungan mereka tidak Harmonis. Arab Saudi bersaing dengan

Iran untuk memperebutkan wilayah pengaruh dan kepemimpinan di kawasan, hubungan Iran Turki juga tidak terlalu harmonis, Turki dengan Mesir kurang cocok dan Mesir dengan Iran pun kurang baik. Melihat konfigurasi seperti itu, peluang Indonesia untuk menjadi penggerak dalam mendorong perjuangan kemerdekaan Palestina dan mempertahankan penyelesaian status Jerusalem. Hal ini disebabkan karena Indonesia dianggap memiliki nilai lebih yang memiliki hubungan baik dengan negara-negara kunci di Timur Tengah dan juga Uni Eropa serta Gerakan Non Blok (GNB) yang bisa digerakkan dalam sidang umum PBB (Trias, 2017).

Selain Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa, Indonesia juga terlibat dalam berbagai diplomasi dalam mendorong Isu Palestina di tingkatan PBB. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan mengadakan pembicaraan dengan negara-negara Eropa, khususnya Prancis yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Awal tahun ini, Perancis mengeluarkan ultimatum kepada Israel untuk segera mewujudkan perdamaian dengan Palestina (“Peran RI di Konflik Palestina 2017,” 2017). Melalui pendekatan luar negeri Indonesia dalam merespon kebijakan Donald Trump diharapkan akan memberikan semangat baru dalam memerjuangkan kemerdekaan Palestina di kancah Internasional.

Kesimpulan

Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap respon kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Donald Trump) memberikan tanda bahwa Indonesia sangat konsisten terhadap isu-isu Palestina. Gejolak politik di Timur Tengah terutama konflik antara Palestina-Israel memberikan peluang bagi Indonesia tampil sebagai negara yang selalu mengusung konsep perdamaian dunia. Pasca pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadikan Indonesia sebagai mediator dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah terutama antara Palestina-Israel.

Referensi

Aslamiah, S. (2015). Diplomasi Indonesia Dalam Mendukung Palestina Menjadi Negara Peninjau Di PBB Tahun 2012. *Jom FISIP*, 2(2).

Ganewati, W. (2016). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama Pusat Penelitian Politik-LIPI.

Ismah Tita Ruslin. (2013). MEMETAKAN KONFLIK DI TIMUR TENGAH (Tinjauan Geografi Politik). *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).

Peran RI di Konflik Palestina 2017. (2017). Retrieved January 23, 2018, from <http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/4615-peran-ri-di-konflik-palestina.html>

Plano, C. J., & Olton Roy. (1978). *The International Relations Dictionary*.

RI jalin langkah tekan Trump. (2017). Retrieved from <https://epaper.kompas.id/baca/kompaspagi/20171208>

Sukamta. (2017). Peran Indonesia Mewujudkan Palestina Merdeka. Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/3748442/peran-indonesia-mewujudkan-palestina-merdeka>

The New Asian-African Strategic Partnership (NAASP). (2012).

Trias, K. (2017). . Jerusalem, OKI, Indonesia, Jalan Masih Panjang. Kompas Analisis, Edisi 19 Desember 2017. Retrieved from <https://epaper.kompas.id/baca/kompaspagi/20171219>

This page is intentionally left blank